

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	11

BAB II SYARAT <i>ACTIO PAULIANA</i> DALAM KEPAILITAN.....	13
2.1 Akibat Hukum Kepailitan	13
2.2 Unsur <i>Actio Pauliana</i> Dalam Kepailitan.....	20
2.2.1 Perbuatan hukum yang dilakukan telah merugikan kepentingan kreditor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.	23
2.2.2 Perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh debitor kepada pihak ketiga atas harta kekayaan pailit.....	24
2.2.3 Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga dimana debitor melebihi kewajiban dari pihak ketiga.....	24
2.2.4 Perbuatan Hukum Merupakan Pembayaran atau Pemberian Jaminan Untuk Utang yang Belum Jatuh Tempo dan/atau Belum atau Tidak Dapat Ditagih.....	25
2.2.5 Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan diri sendiri atau pihak yang masih berkaitan dengan harta kekayaan pailit debitor.	26
2.3 Perbandingan <i>Actio Pauliana</i> Dalam Kepailitan dengan <i>Actio Pauliana</i> dalam Hukum Perdata	27
2.3.1 <i>Actio Pauliana</i> dalam kepailitan.....	27
2.3.2 <i>Actio Pauliana</i> Dalam Hukum Perdata.....	28
2.3 Kajian Kasus <i>Actio Pauliana</i>	31

BAB III EKSEKUSI <i>ACTIO PAULIANA</i> DALAM KEPAILITAN	41
3.1 Prosedur Eksekusi Putusan <i>Actio Pauliana</i>	41
3.1.1 Pengertian Eksekusi.....	41
3.1.2 Asas-Asas Hukum Eksekusi	42
3.1.3 Eksekusi Putusan <i>Actio Pauliana</i>	46
3.2 Akibat Hukum Putusan <i>Actio Pauliana</i>	52
3.3 Perlindungan hukum bagi pihak ketiga.....	53
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)